



# RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



## 2017-2022

**MEWUJUDKAN PROVINSI PAPUA BARAT YANG SEHAT,  
BERKUALITAS DAN BERKEADILAN**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
DINAS KESEHATAN

Jl. Brigjen Marinir Abraham O. Ataruri, Kompleks Kantor  
Gubernur Provinsi Papua Barat

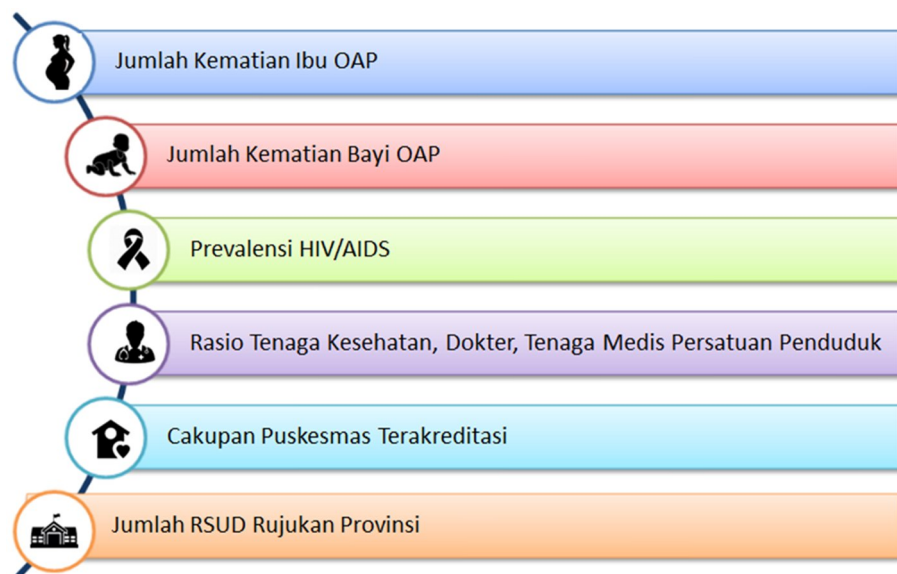
Arfai - Manokwari - Papua Barat Kode Pos : 98315

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
	2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	17
	2.3 Kinerja Pelayanan	19
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	21
BAB III	PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
	3.2 Telaahan Visi Misi Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	31
	3.3 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	34
	3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	34
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI	RENCANA PROGRAM SERTA PENDANAANNYA	52
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII	PENUTUP	65
LAMPIRAN	DAFTAR ASET	

BAB. I

PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga negara. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua Barat juga dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/ masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berasaskan prikemusiaan, keseimbangan manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat yang selama ini dilaksanakan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian derajat kesehatan di Provinsi Papua Barat masih terhitung rendah apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang antara lain,

ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi, anak balita dan ibu maternal serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang, masih tingginya angka kematian akibat penyakit menular, kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antarwilayah, belum meratanya pemenuhan tenaga kesehatan dan terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.

Oleh karenanya dipandang perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai pedoman dalam perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun 2017-2022.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan No 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat Tahun 2017-2022.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi pembangunan kesehatan Provinsi Papua Barat secara berkesinambungan.

Adapun penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman dalam perencanaan program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2017-2022.
2. Menjabarkan program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk kurun waktu tahun 2017-2022 .
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
4. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi kinerja dimasa mendatang.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi Misi Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program Kegiatan serta pendanaannya.

Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Bab VIII Penutup



BAB. II

GAMBARAN  
PELAYANAN

